

**Rendahnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil  
Walikota Medan Tahun 2015; Suatu Tinjauan Antropologi Politik**

***Low Voter Participation in The 2015 Mayor and Deputy Mayor Election Field; A  
Review of Political Anthropology***

**Edy Suhartono<sup>1)</sup>, Usman Pelly<sup>2)</sup>, Ichwan Azhari<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>

<sup>2) & 3)</sup> Universitas Negeri Medan, Indonesia  
edi.suhartono@gmail.com

**Abstrak**

Tulisan ini mendiskusikan dan mengkaji proses pemilihan Walikota dan Walikota Medan tahun 2015 dalam perspektif antropologi politik yang bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai praktik dan realita politik di Indonesia secara umum dan pada tingkat politik lokal secara khusus yang diwarnai persinggungan antara praktik politik dan realita kultural dalam kehidupan masyarakat Kota Medan dalam bingkai rendahnya partisipasi politik masyarakat secara perhitungan kuantitatif. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan alat bantu berupa metode etnografi yang bertujuan untuk dapat menggambarkan secara menyeluruh bagian-bagian yang terkait dengan; 1. Rendahnya partisipasi politik masyarakat, 2. Dimensi sosial, kultural, religi dalam praktik realita politik masyarakat, 3. Mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai fenomena politik; pemilihan umum pada skala politik lokal. Penulisan mendapatkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi; pemilihan walikota dan wakil walikota Medan tahun 2015 merupakan suatu dimensi korelasional antar praktik politik dan realitas sosial, budaya, religi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Praktik politik yang dimaksudkan sebagai wujud demokrasi berjalan dengan diwarnai beragam fenomena yang tidak berdiri sendiri melainkan bertautan satu dan yang lainnya serta menjadi wacana praktik politik lanjutan yang berdiri diatas konsep demokrasi seutuhnya dengan tetap mengikutsertakan pengetahuan sosio-kultural dan religi pada praktiknya, penulisan ini juga menggunakan pendekatan sinkronik (dimensi waktu) untuk mendapatkan hal awal yang membentuk dan perihal setelah kejadian untuk mendapatkan suatu narasi yang menyeluruh. Kesimpulan dari penulisan ini sampai pada pola hidup masyarakat perkotaan yang kompleks serta didasari komposisi masyarakat yang heterogen telah mampu membentuk suatu penentangan (resistensi) masyarakat terhadap pilihan dan perspektif politik yang dilakukan oleh masyarakat sebagai wacana tanding terhadap praktik politik yang menjadi se bentuk praktik elit politik, pada sisi lain kajian ini memberikan gambaran mengenai praktik dan realita politik lokal dalam perspektik antropologi.

**Kata Kunci:** Antropologi Politik, Pemilihan, Partisipasi.

### Abstract

This paper discusses and examines the election process for the Mayor and Mayor of Medan in 2015 in the perspective of political anthropology which aims to get an overview of political practices and reality in Indonesia in general and at the local political level specifically colored by the intersection between political practice and cultural reality in life Medan City community in the frame of the low political participation of the community in quantitative calculations. In this writing, the authors use tools in the form of ethnographic methods that aim to be able to describe thoroughly the parts related to; 1. The low political participation of the community, 2. The social, cultural, religious dimensions in the practice of the political reality of the community, 3. Getting a comprehensive picture of the political phenomenon; elections on the scale of local politics. The writing found that the low level of community participation in the democratic party; the election of the mayor and deputy mayor of Medan in 2015 is a correlational dimension between political practices and the social, cultural, and religious realities that develop in people's lives. Political practice which is intended as a form of democracy runs with a variety of phenomena that are not independent but intertwined with one another and become a discourse of continued political practice that stands on the concept of democracy as a whole by continuing to include socio-cultural and religious knowledge in practice, this writing also uses synchronous approach (time dimension) to get the initial thing that shapes and matters after the event to get an overall narrative. The conclusion of this paper comes to the complex lifestyle of urban society and based on the composition of a heterogeneous society that has been able to form a resistance (resistance) of the community to political choices and perspectives made by the community as a discourse against political practices that form a practice of political elites, in the other side of this study provides an overview of local political practices and realities in anthropological perspectives.

**Keywords:** Political Anthropology, Election, Participation.

## I. PENDAHULUAN

Kota Medan adalah ibukota propinsi Sumatera Utara dengan jumlah populasi pada tahun 2016 sebanyak 2,228,408 jiwa dengan luas area seluas 265.10 km<sup>2</sup>. Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan. Masing masing kecamatan tersebut adalah: Medan Barat, Medan Baru, Medan Timur, Medan Area, Medan Kota, Medan Polonia, Medan Petisah, Medan Johor, Medan Tuntungan, Medan Helvetia, Medan Sunggal, Medan Labuhan, Medan Deli, Medan Belawan, Medan Tembung Marelان, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Denai, Medan Perjuangan, Medan Marelان, Medan Tuntungan. Orang Melayu dapat dikatakan sebagai tuan rumah atau kelompok etnis pertama yang berdiam di daerah ini, karena itu mereka disebut sebagai tuan rumah (*host population*). Selanjutnya diikuti oleh kelompok etnis lainnya seperti: Karo, Simalungun, Pakpak Dairi, Toba, Sipirok, Mandailing, Angkola, Melayu Pesisir, Minangkabau, Aceh, Jawa, Cina, India, Sunda, Arab, Bugis dan Nias<sup>1</sup>

Kota Medan adalah potret sebuah kota multietnik dan ini merupakan realitas sejarah dan budaya yang tidak bisa dipungkiri. Fakta ini seharusnya tidak dilihat dalam artian negatif tapi merupakan sebuah potensi modal sosial yang dapat digunakan untuk membangun daerah ini. Secara khusus dalam hal pembangunan politik yakni pada saat memilih pemimpin melalui kegiatan Pemilihan Umum. Realitas etnik merupakan sebuah potensi yang bisa dijadikan sebagai salah satu sumber perolehan dukungan suara atau kantong suara pada setiap pemilihan.

---

<sup>1</sup>Pelly, Usman: Etnisitas dalam Politik Multikultural, Buku III, Casamesra Publisher, Medan, 2016.

Berdasarkan riset yang pernah dilakukan oleh EM. Bruner, Antropolog Amerika, sebagaimana yang dikutip oleh Usman Pelly (1994)<sup>2</sup> bahwa di Kota Medan tidak ada budaya dominan. Artinya semua etnik memiliki potensi, karakteristik dan preferensi yang spesifik. Hal ini dapat dilihat melalui pola pola pemukiman, pekerjaan dan orientasi dari masing masing kelompok etnik dalam realitas kehidupan sehari hari. Karena keberagamannya ini, Kota Medan selain diakui sebagai kota multietnik, tapi sekaligus merupakan kota terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya. Bahkan karena realitas keberagamannya ini, Kota Medan sesungguhnya menggambarkan sebuah miniatur tentang Indonesia.

Dari hasil sensus penduduk nasional tahun 2010 tercatat ada 5 suku bangsa dengan populasi yang cukup besar, yakni etnis Jawa menduduki peringkat pertama sebagai etnis yang paling banyak jumlah penduduknya di negeri ini, dengan jumlah sebesar 40.22%. Selanjutnya diikuti oleh etnik Sunda, sebesar 15.5% pada posisi kedua; etnik Batak sebesar 3.58 % pada posisi ketiga. Diikuti oleh suku suku yang ada di Sulawesi sebanyak 4% pada posisi keempat; dan diurutan kelima di diduduki oleh Suku Madura 3.03%.

Sementara itu, di Sumatera Utara gambaran komposisi jumlah penduduk dan distribusi etnik yang ada baik di Sumatera Utara dan Kota Medan khususnya berdasarkan hasil sensus tahun 2010 sebagaimana mengacu dari Akhir Matua Harahap adalah sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini:

<b>Distribusi Etnik di Sumatera Utara dan Kota Medan Tahun 2015</b>		
<b>Suku Bangsa</b>	<b>Propinsi Sumatera Utara</b>	<b>Kota Medan</b>
Angkola-Mandailing	13.54	10.16
Karo	5.49	4.62
Dairi	0.78	0.42
Simalungun	2.50	1.41
Pesisir	1.38	1.10
Toba	20.83	17.12
Nias	7.01	1.10
Minangkabau	2.61	7.83
Melayu	4.42	5.76
Jawa	33.47	33.19
China	2.63	9.47
Aceh	0.95	2.70
Banjar	0.99	0.47
Lainnya	3.40	4.65
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Data olahan Sensus tahun 2010, oleh Akhir Matua Harahap (2016)

Selanjutnya Harahap melakukan analisis dan olahan terhadap data etnik sekaligus melakukan komparasi distribusi etnik yang ada di Kota Medan antara tahun 1930 dan 2010 dengan hasil sebagaimana tergambar di bawah ini:

---

<sup>2</sup>Pelly, Usman, Urbanisasi dan Adaptasi: Peran Missi Budaya Minangkabau dan Mandailing, LP3ES, Jakarta, 1994.

<b>Penduduk Kota Medan Menurut Etnik</b>		
	<b>1930</b>	<b>2010</b>
Batak	7.7	34.6
Jawa	24.9	33.2
Tionghoa	35.6	9.5
Melayu	7.1	7.0
Minangkabau	7.3	7.8
Nias	-	1.1
Aceh	-	2.7
Eropa/Belanda	5.6	-
Asia Lainnya	4.9	-
Lainnya	6.9	6.8
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

Sumber: Persentase Etnik di Kota Medan, 1930 dan 2010. Hasil olah data oleh Akhir Matua Harahap (2016)

Pemilihan secara langsung terhadap calon pemimpin daerah oleh masyarakat membawa angin perubahan dengan mendekatkan antara pemilih dengan calon pemimpin daerah, proses dialektika diantaranya dapat berjalan dengan lebih intens, memotong panjangnya jalur administrasi politik yang panjang melalui sistem keterwakilan lembaga legislatif dan dalam artian yang lebih sempit mengembalikan hak-hak dasar masyarakat secara luas untuk berpartisipasi pada proses politik dalam lingkup politik lokal secara demokratis.

Era pemilihan serentak dan langsung ini mulai diinisiasi sejak tahun 2004 meskipun dilakukan secara bertahap dan dilaksanakan di beberapa daerah. Hal ini menjadi penanda semakin berkembangnya demokrasi di negeri ini untuk mewujudkan pemilihan yang bersifat langsung umum, bebas dan rahasia. Beberapa jenis pemilihan umum seperti, pemilihan legislatif (DPR RI, DPD, DPRD) serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menandai proses pemilihan langsung dan serentak di negeri ini. Pesta demokrasi yang sebelumnya berlangsung pada setiap lima tahun sekali, namun sejak berlangsungnya pemilihan langsung dan serentak di berbagai di wilayah, masyarakat kemudian dihadapkan dengan proses pemilihan yang berlangsung hampir setiap tahun di berbagai daerah tergantung pada berakhirnya masa jabatan lima tahun sebagai kepala daerah maupun keanggotaan di lembaga legislatif.

Semakin terbukanya secara luas partisipasi masyarakat dalam pemilihan calon kepala daerah pada saat sekarang ini, menarik untuk melihat bahwa hal tersebut ternyata tidak serta-merta disertai meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam memilih pemimpin.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Medan, pada 10 tahun terakhir, misalnya, terhitung sejak sejak tahun 2004 hingga 2015 persentase pemilih warga yang hadir di TPS dan menggunakan hak pilihnya menunjukkan angka yang semakin menurun<sup>3</sup>. Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015, bahkan angka partisipasi pemilih menurun tajam ke angka 25.38 %, tingkat partisipasi terendah di seluruh Indonesia.

Terhitung sejak 2004, pesta demokrasi di Indonesia mulai dilakukan secara langsung meskipun belum serentak, prosesnya masih berlangsung secara bertahap. Penyelenggaraan

---

<sup>3</sup>Trend Data Partisipasi Pemilih di Kota Medan 2004-2015

pemilihan ini adalah dimaksudkan bahwa agar kegiatan Pemilihan ini semakin efektif dan efisien<sup>4</sup>. Sehingga dari sisi anggaran dapat dihemat. Hingga pada akhirnya nanti, pesta demokrasi “Pemilihan Umum” dilaksanakan cukup sekali saja<sup>5</sup>

Pada bulan Mei hingga Juli tahun 2015 Lembaga Survey Indonesia (LSI) dengan dukungan dana dari KPU Medan melakukan survey terhadap “*Perilaku Pemilih di Kota Medan.*” Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menelusuri lebih jauh tentang perilaku pemilih di Kota Medan kaitannya dengan rendahnya partisipasi masyarakat pada beberapa Pilkada yang berlangsung di daerah ini. Hasilnya terlihat bahwa secara umum rendahnya partisipasi tidak semata-mata disebabkan faktor internal terkait kerja penyelenggara Pemilihan, tapi juga terkait dengan faktor eksternal, seperti rasa jenuh masyarakat terhadap proses Pemilihan, sosok pemimpin yang selalu terjerat kasus korupsi serta tidak jalannya proses pendidikan politik oleh Partai Politik<sup>6</sup>.

Pada tahun 2017<sup>7</sup>, Balitbang Kota Medan juga melakukan survey tentang “*Partisipasi Pemilih di Kota Medan pada Pilkada Walikota Medan Tahun 2015.*” Survey ini sebagai wujud kerjasama dan komitmen Pemerintah untuk memberikan masukan kepada KPU Medan terkait rendahnya angka partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015. Dari kegiatan survey ini terungkap bahwa alasan pemilih tidak memilih diantaranya adalah karena Pilkada tidak membawa perubahan sebanyak 24.36% pemilih memberi jawaban; sebanyak 18.59% menyatakan Pilkada tidak menarik; sebanyak 5.45% menjawab tidak memilih karena letak TPS terlalu jauh; menjawab sedang bekerja sebanyak 4.17%; dan menjawab tidak memilih karena tidak mendapat undangan memilih sebanyak 3.53%; serta menjawab tidak memilih karena tidak terdaftar sebagai pemilih sebanyak 3.21% dari total jumlah 400 informan yang disurvei,

Pengalaman Kota Medan dalam melaksanakan pesta demokrasi pada sepuluh tahun terakhir dengan trend angka partisipasi yang semakin menurun hingga ke angka 25.38% pada saat Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 telah menimbulkan berbagai pertanyaan seputar kesadaran warga tentang arti penting pemilihan serta kualitas pemilihan yang berlangsung. Meskipun dari beberapa riset maupun survey yang telah dilakukan mengungkap banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih di Kota Medan. Namun secara Antropologis, penyebab utama rendahnya partisipasi pemilih di Kota Medan belum atau tidak terjelaskan dengan baik. Oleh karena itu melalui penulisan ini nantinya yang akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan dan metode serta analisis secara Antropologis, diharapkan dapat mengungkap aspek penyebab rendahnya partisipasi pemilih di Kota Medan.

Sebagai bentuk penulisan ilmiah, penulisan ini menggunakan metode sebagai cara mendeskripsikan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat terkait dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada Walikota Medan tahun 2015, Jenis penulisan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan metode studi kasus dalam tinjauan etnografis, penggunaan metode studi kasus dimaksudkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Fenomena pilkada Walikota Medan tahun 2015 yang telah berlalu (sinkronik)

---

<sup>4</sup> Sebagaimana termaktub dalam Bab II, pasal 3 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>5</sup> Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif yang akan berlangsung pada 17 April 2019 menjadi penanda kesiapan KPU untuk melaksanakan Pemilihan Umum secara langsung dan serentak secara nasional pada tahun 2024

<sup>6</sup> Kegiatan survey ini dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia. Survey (LSI) perwakilan Sumatera Utara yang menyasar responden sebanyak 100 orang; masing-masing mewakili Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Helvetia dan Kecamatan Medan Timur sejak Mei s/d July 2015

<sup>7</sup> Survey dilakukan oleh Balitbang Kota Medan terhitung sejak bulan Juni s/d September 2017 dengan mengambil sampel sejumlah 400 orang yang berasal dari berbagai kecamatan yang ada di Kota Medan

2. Fenomena trend rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan di Kota Medan sebagai isu kontemporer yang menarik perhatian (diakronik)
3. Analisis faktor sosial budaya yang bergerak dari pemahaman kasus pilkada Walikota Medan tahun 2015

Lokasi penulisan ini dilakukan di Kota Medan, dengan memperhatikan aspek sinkronisasi waktu antara tahun 2015 hingga tahun penulisan ini berjalan (2017) serta proyeksinya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018. Secara spesifik lokasi penulisan ini di fokuskan di Lima Kecamatan dan Sepuluh Kelurahan yang ada di Kota Medan, yakni Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Baru. Kelima kecamatan ini secara berurutan merupakan Kecamatan dengan angka partisipasi pemilih yang sangat rendah pada Pilkada Walikota Medan tahun 2015. Masing masing wilayah kecamatan tersebut dipilih informan yang berasal dari kelurahan di mana lokasi TPS terendah tingkat kehadiran pemilihnya. Untuk Kecamatan Medan Amplas ada di Kelurahan Timbang Deli 17.90% dan Harjo Sari I dengan tingkat kehadiran pemilih ada di angka 19.01%. Kecamatan Medan Baru, ada di kelurahan Padang Bulan sebesar 17.50% dan Kelurahan Titi Rante sebesar 19.20%; untuk Kecamatan Medan Helvetia ada di Kelurahan Cinta Dame dan Kelurahan Sei sikambang C2 masing masing dengan tingkat kehadiran 18.35% dan 15.64%, untuk Kecamatan Medan Sunggal ada di Kelurahan Simpang Tanjung dan Kelurahan Sunggal dengan tingkat kehadiran pemilih 18.43% dan 21.38%; untuk Kecamatan Medan Denai ada di Kelurahan Binjai dan TSM II, yakni masing masing 21.00% dan 18.23%.

Aspek kajian antropologi sinkronik yang akan dilihat dalam penulisan ini berupa pengalaman dan dokumentasi hasil pilkada Walikota Medan tahun 2015 serta pengalaman masyarakat secara diakronik dalam konteks Pilkada hingga saat penulisan ini berlangsung serta proyeksinya pada momentum pemilihan yang akan datang.

Penulisan ini juga mencoba memperhatikan keterkaitan antara fenomena lokal Pilkada Walikota Medan tahun 2015 dengan realitas nasional maupun global terkait perkembangan kehidupan demokrasi melalui ajang Pemilihan Umum, untuk dapat menangkap jawaban baik dari aspek kognitif dan afektif responden terpilih yang menjadi sasaran penulisan ini diberikan kuisisioner. Ada 20 informan terpilih yang dibagikan kuisisioner yang berasal dari 5 kecamatan yang rendah partisipasinya. Selanjutnya untuk mendapatkan pendalaman atas jawaban yang diberikan oleh informan, penulis melakukan wawancara mendalam (depth interview) kepada 7 orang informan yang berasal dari masing masing kecamatan yang ada.

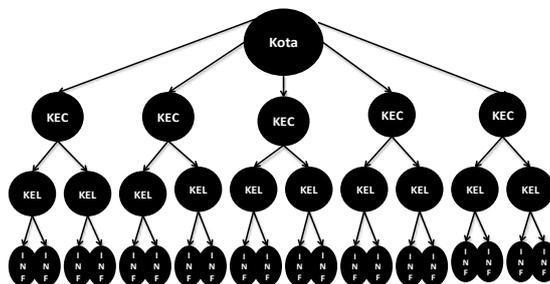
Selanjutnya untuk mendapatkan jawaban yang lebih beragam dan signifikan terkait rendahnya partisipasi pemilih pada Pemilu Walikota Medan tahun 2015, penulis merasa perlu untuk menambah jumlah informan yang diwawancarai, yang diharapkan dapat memberikan jawaban serta penjelasan yang lebih komprehensif sehingga memperkaya jawaban dari para informan yang diwawancarai sebelumnya. Informan ini berasal berbagai latar belakang, seperti: akademisi, wartawan, penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Panwas yang bertugas pada Pilwako tahun 2015 serta pihak pihak yang dianggap relevan.

Observasi dalam penulisan ini adalah observasi dalam bentuk partisipasi maupun non-partisipasi. Observasi non-partisipasi merupakan cara yang dipilih ketika penulis tidak dapat terlibat langsung dalam suatu peristiwa tertentu yang berkaitan dengan masyarakat dan praktik politik pilkada Walikota Medan tahun 2015, sehingga penulis memiliki posisi diluar dari masyarakat.

Kecamatan	Identitas Informan/Umur/ Jenis Kelamin	Latar Belakang Pendidikan	Kategorisasi Sosial Budaya
Medan Amplas	Warsi, 42 Tahun, Laki-laki	SMK	Islam, Jawa
	Frans Situmorang, 35 Tahun, Laki-laki	SMA	Kristen, Batak Toba
Medan Denai	Riyad, 47 Tahun, Laki-laki	Sarjana	Islam, Melayu
Medan Baru	Lintu Ulina, 40 Tahun, Perempuan	Sarjana	Islam, Karo
	Putri Trimayanati, 34 Tahun, Perempuan	Sarjana	Jawa, Islam
Medan Sunggal	Iksa, 38 Tahun, Perempuan	SMA	Islam (muallaf), Cina
Medan Helvetia	Syaiful, 42 Tahun, Laki-laki	Sarjana	Islam, Mandailing

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*depth interview*) kepada beberapa native informan yang sesuai dengan tujuan penulisan, yakni mereka yang memiliki hak pilih pada masa pilkada Walikota Medan tahun 2015 namun tidak menggunakan hak pilihnya. Wawancara mendalam dilakukan pada native informan yang tidak memilih pada saat Pilkada Walikota Medan tahun 2015 dan mewakili beberapa daerah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Medan dengan tingkat partisipasi rendah ketika pilkada Walikota Medan tahun 2015 berlangsung. Ada lima Kecamatan terendah partisipasinya yang akan dipilih sebanyak 20 orang dengan rincian 2 orang dari masing masing etnik yang ada di masing masing Kelurahan dalam Kecamatan bersangkutan, yakni: Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Sunggal, Medan Helvetia. Sebanyak 20 orang yang akan diwawancarai serta dibagikan *interview guide* dan sebanyak 5 orang native informan akan diwawancarai secara mendalam (*depth interview*) di masing masing kecamatan dan kelurahan serta berdasarkan kategori etnik, agama, jenis kelamin dan pendidikan.

**FLOW CHART : INFORMAN**



Keterangan :  
 Kota.....Kota Medan  
 Kec.....Kecamatan di Kota Medan  
 Kel.....Kelurahan di Kota Medan  
 Inf.....Informan

## II. PEMBAHASAN

Catatan lapangan (*field note*) dan hasil interview terhadap beberapa informan terpilih yang ada di beberapa wilayah Kelurahan di bawah lingkup Kecamatan di Kotamadya Medan yang merupakan wilayah tempat tinggal informan. Adapun jumlah informan yang dibagikan *interview guide* ada sebanyak dua puluh orang mewakili lima Kelurahan dengan tingkat partisipasi politik rendah ketika pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 dengan irisan ragam latar belakang etnik, jenis kelamin, religi, dan tingkat pendidikan. Adapun proses pendeskripsian terhadap informan dalam penulisan ini akan dideskripsikan melalui teknik *life history* untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai informan dengan penggunaan hak pilih politik mereka pada pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 yang lalu.

### Warsi

Pak Warsi adalah warga yang tinggal di kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Deli. Beliau sudah tinggal di kelurahan ini sejak tahun 2002. Dalam kurun waktu 16 tahun bermukim di wilayah ini Pak Warsi menjadi seorang yang telah melewati beberapa pemilihan umum dan memahami bagaimana dinamika politik yang ada di wilayahnya.

Pengalaman politik yang dialami seorang Pak Warsi cukup beragam. Hal ini terlihat dari 16 tahun tinggal di Kota Medan memperlihatkan bahwa ia adalah sosok yang benar-benar melihat figur dari calon tersebut kemudian memilihnya. Terkhusus pemilihan walikota tahun 2015, Pak Warsi termasuk warga yang tidak menggunakan hak politiknya ketika itu. Alasan seorang Pak Warsi tidak menggunakan hak pilihnya tidak berasal dari kekeledoran dari pihak penyelenggara sebagaimana yang ramai diperbincangkan kala itu, hal ini terlihat dari pengakuan beliau karena pada tahun 2015 beliau mendapatkan formulir undangan C6, dengan kata lain beliau mendapatkan hak dan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya namun tidak ia lakukan.

Alasan Pak Warsi tidak datang memilih adalah minimnya sosialisasi yang ia terima, beliau merasa tidak kenal dengan calon walikota yang sedang bersaing. Hal ini terlihat dari beliau yang tetap saja bekerja meskipun hari pemilihan adalah hari libur. “itulah dia masalahnya pak, kita gak kenal dengan mereka, Eldin itu siapa, Ramadhan pohan itu siapa, latar belakang orang itu seperti apa. Kerjanya gimana, intinya gak tahulah siapa mereka kalau fotonya dari poster poster itulah pak, kalau ketemu langsung sama orangnya kan memang gak pernah. Kalau programnya pun kayaknya gak ada pak, sekarang beginilah pak, kalau udah sama orangnya saja kita gak kenal apalagi sama janjinya pun kita gak tahu. Bukan juga karena suku saya milih pak, tapi karena seiman, tapi yang inipun gak kenal cemani?”

Penggalan wawancara di atas juga memperlihatkan alasan utama dalam memilih adalah sebuah karya, namun bagi seorang Pak Warsi juga berharap seorang pemimpin juga harus seiman. Baginya jika calon itu tidak memiliki karya, setidaknya memiliki satu keimanan dengan beliau yakni Islam. Namun pandangannya khusus untuk pemilihan walikota Medan tahun 2015, beliau merasa tidak mengenal calon yang tengah bertarung tersebut.

### Frans Situmorang

Frans Situmorang, warga Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas ini mengaku dapat undangan C6 pada saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 yang lalu. Namun ia tidak datang ke TPS untuk mencoblos, berikut alasan yang disampaikannya. “Dapat undangan formulir C6, lokasi TPS-nya di dekat sini (dekat rumah), sekitar 150 meter jaraknya, tapi saya tidak datang ke TPS karena calonnya tidak kenal secara

baik ..ya cuma sekedar tau gitu aja. Eldin tahu, karena dia incumbent sebelumnya, tapi ya begitu gak ada juga hasilnya (perubahan) selama menjadi Walikota”.

### **Riyad**

Riyad adalah warga Medan Denai, berumur 47 tahun. Beliau beretnis Melayu yang tinggal di Kecamatan Medan Denai. Terkait pandangan politik, Riyad pada dasarnya memiliki pandangan yang terbuka. Hal ini terlihat dari keterbukaan beliau ketika ditanya tentang pandangan politiknya terkait kota Medan.

Riyad termasuk salah satu warga yang tidak menggunakan hak pilihnya di pemilihan walikota Medan tahun 2015. Beliau mendapatkan undangan C6 kala itu, namun tetap enggan datang ke TPS. Baginya sosok yang menarik itu sangat penting, dan beliau merasa dua pasangan calon yang bertarung kala itu tidak menarik perhatiannya. “terkait calon yang dipilih-pilih itu kpu sendiri kan gak bisa nentukan siapa yang harus ya, kemudian kadang orang yang terpilih itu kita gak kenal tapi kawan-kawan kita kenal, makanya kadang dari kawan-kawan itu kita dapat informasi, tapi kalau langsung gak kenal memang. Tapi memang saya sama kakaknya adeknya orang tuanya memang kenal, paling kalau ngomong langsung pas abangnya meninggal itulah (salah satu calon).”

Lebih lanjut Riyad menuturkan mengenai dua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 di mata masyarakat, “memang udah jauh sebelumnya, keputusan sendiri, lagian kita tahu dia secara pribadi, tapi tidak mempengaruhi orang gitu, cukup kita sendiri aja. Hari H malasnya walaupun saya dekat dengan keluarganya, orang saya manggilnya mak eldin.”

Dari penggalan wawancara dengan Riyad terlihat bahwa beliau mengenal baik salah satu pasangan calon yakni Dzulmi Eldin dan Akhyar Nasution, hanya saja mengenal seorang sosok dengan baik hingga keluarganya tidak membuat seseorang ingin memilih beliau. Kondisi ini tentu menarik tentang hal yang membuat hal itu terjadi. Riyad memperlihatkan hal tersebut bagaimana beliau pada akhirnya enggan menyuarakan suaranya ke TPS pada saat itu.

Bagi seorang Riyad ada beberapa hal yang mendasari bahwa sosok Dzulmi Eldin yang ia kenal dengan baik menjadi tidak menarik. Hal ini terlihat dari penggalan wawancara berikut: “tahu ya tahu, tapi profilnya memang gak menarik, satu tidak pernah mengangkat orang-orang Medan yang berbakat. Orang-orang pintar yang sekolah itu gak pernah diperhatikan. gimana ya, gak ada niat mengangkat Kota Medan ini, jadi semua ada kepentingan pribadi gitu.”

Penggalan wawancara di atas menunjukkan sisi kekecewaan Riyad kepada Dzulmi Eldin yang tidak mengangkat orang-orang berbakat dari medan untuk menjadi bagian dari pembangunan. Beliau lebih konsen menempatkan orang-orang yang mendukungnya untuk menempatkan posisi strategis dengan asa kepentingan pribadi. Tingkat kekecewaan Riyad terlihat juga pada banyaknya pengangguran di kota Medan. Lulusan-lulusan terbaik dari universitas yang bagus kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan.

### **Linta Ulina Br. Bangun**

Linta Ulina Br. Bangun adalah warga yang tinggal di Kelurahan Titi Rante Kecamatan Medan baru. Beliau tinggal di sekitaran wilayah Padang Bulan berdekatan dengan kegiatan akademik Universitas Sumatera Utara. Sebagai seorang perempuan etnis Karo dengan latar pendidikan sekolah menengah atas dan berinteraksi dengan beragam masyarakat dan latar belakang yang berbeda menjadikannya sosok perempuan yang paham akan tindak politik pada tataran praktikal

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 adalah salah satu pengalamannya dalam mengikuti pesta demokrasi politik di negeri ini. Pengalamannya mengikuti pesta demokrasi seperti biasanya membuatnya memiliki semangat yang berbeda untuk menatap masa depan Kota Medan dengan pilihan sikap dan pandangan politik yang

dimilikinya secara personal. Dengan antusias dan harapan untuk datang ke TPS dan mendapatkan tanda hitam di jari tangan sebagai bukti telah memiliki biasanya merupakan kebanggaan. Namun tidak untuk Lita Ulina Br. Bangun, beliau melewatkan kesempatan mencurahkan pilihan dan sikap politiknya itu begitu saja. “Waktu itu dapat memang C6, tapi memang gak jadi datang ... gak ada untungnya itu milih, jadinya ya gak datang pak. Nyesel sih, karena waktu itu kan pemilihan Walikota (Medan) yang dekat dengan keseharian tapi yaudalah.”

Terlepas dari pilihannya untuk tidak memilih pada hari H, Linta Ulina Br. Bangun sedikitpun tidak tertarik dengan jargon pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 dengan konsep Medan Rumah Kita, baginya hal ini tidak menarik penyampaian pesannya karena tidak sesuai secara praktik.

Pada hari pemilihan beliau melihat warga memang terlihat sepi yang datang ke TPS. Tidak banyak yang lalu lalang. Saat itu dia berpikir mungkin waktu itu warga berpikiran sama dengan dirinya, tidak memilih karena tidak melihat sisi menarik dari dua pasangan calon tersebut.

Belakangan, Linta Ulina Br. Bangun baru memahami mengenai politik, pemilu, calon, kampanye dan beragam atribusi pilkada lainnya dalam tataran lanjutan bahwa janji kampanye yang manis tak selamanya berbuah manis pula melainkan harus menanggung konsekuensi selama lima tahun berikutnya atas pilihan yang tidak tepat.

Pada akhirnya Linta Ulina Br. Bangun merasakan bahwa keputusan tidak memilih kala itu, bukan keputusan yang begitu buruk. Dengan kata lain ia tidak ikut bertanggung jawab atas kinerja yang minim dari walikota terpilih.

## **Putri**

Putri, begitulah biasa sahabat dan keluarganya memanggil. Beliau adalah seorang wanita etnis Jawa berumur 34 tahun. Beliau beragama Islam dan berdomisili di wilayah Padang Bulan Kecamatan Medan baru. Sehari-hari putri bekerja sebagai seorang guru. Baginya profesi ini adalah profesi yang mulia, dimana ia dapat menyebarkan ilmu ke murid-muridnya. Bagi putri menjadi seorang guru adalah impian masa kecilnya yang telah terwujud.

Tingkat pendidikan yang tinggi membuat Putri juga memiliki analisisnya sendiri tentang dunia politik. Baginya politik adalah dunia yang kotor, tempat mereka yang biasa menipu dan mengumbar janji. Beliau termasuk yang tidak suka dengan politik walaupun beliau sadar pentingnya politik, sehingga beliau sangat selektif terhadap perkembangan politik dan pemilihan umum yang sedang berlangsung.

Terkait pemilihan walikota medan tahun 2015, Putri termasuk yang tidak memberikan hak pilihnya. Beliau memiliki alasan untuk keputusannya tersebut. Berikut adalah alasan dari keputusannya meskipun beliau tidak mendapatkan undangan C6. “sebenarnya saya ingatnya ada pemilihan, Cuma jawabannya sama kayak orang lain. Sama ajanya, dia dia juga yang maju (pasangan Zulmi Eldin dan Akhyar), kalau kenal ya kenal. Karna orang-orang itu juga gak beres-beres juga Kota ini gini-gini aja, gak banyak perubahan walaupun dia yang dipilih. Bukan karena alasan suku, misalnya karena ini orang Jawa terus dipilih. Kayak misalnya pajak, semua dipajakin, mau hancur Negara ini. Gak ada ngaruh juga siapapun yang mimpin. Jadi kan pemikirannya orang ngerasa gak penting kali buat milih itu. Makanya, niat buat milih itu ada, dapatnya undangan cuma pas di Hari H liat calonnya kayak gitu, libur pulak, cari kesempatanlah orang buat kegiatan lain.”

Penggalan wawancara di atas memberikan gambaran bahwa Putri bukan seorang yang tidak paham tentang pemilu dan siapa yang sedang bersaing pada pemilihan walikota. Beliau cukup paham, namun melihat minimnya perubahan yang terjadi di kota Medan beliau merasa tidak ada gunanya untuk datang memilih kala itu. Bagi putri, sosok itu sangat penting, tentang

apa yang ia lakukan dan bagaimana sikapnya. Sosok yang tepat untuk memimpin kota medan bagi seorang Putri adalah sosok yang mampu melayani di tengah banyaknya kepentingan, banyak suku dan problem yang kompleks.

Keputusan tidak memilih pada pemilihan walikota medan tahun 2015 hadir dalam proses pengamatan yang Putri lakukan yang ia elaborasi dari pengalaman dan penglihatan. Hal ini tidak hadir di hari H namun sejak dimulai masa kampanye, dimulai foto-foto, spanduk, dan baliho yang menghiasi kota Medan.

Keputusan tidak memilih pada pemilihan walikota medan merupakan keputusan pribadi milik Putri tanpa paksaan dan himbauan. Atas dasar keputusan pribadi tersebut, beliau merasa tidak berhak untuk mengajak orang memiliki pandangan yang sama.

### **Iksa**

Iksa adalah seorang ibu rumah tangga berumur 38 tahun. Beliau tinggal di sebuah komplek yang lazim disebut sebagai “Komplek Cina.” Komplek yang terletak di Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal. Beliau sudah tinggal di komplek ini cukup lama, hampir seluruh hidupnya tinggal di wilayah ini yakni sekitar 33 tahun. Dengan durasi sepanjang itu Iksa banyak melihat perubahan di wilayah tersebut.

Iksa adalah seorang etnis Tionghoa. Nama Iksa adalah nama Indonesia yang sering ia pakai dalam berinteraksi dan komunikasi sehari-hari di lingkungannya. Lazimnya seorang yang beretnis Tionghoa memiliki nama Tionghoa pula. Beliau memiliki nama Tionghoa yaitu Cheng Meymey. Nama ini beliau dapat karena beliau adalah anak paling bungsu di keluarganya.

Terkait pilihan politik dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015, Iksa tergolong warga yang tidak aktif dalam menangkap isu maupun mencari beragam informasi calon yang tengah bersaing, terkhusus pada pemilihan walikota Medan 2015, Iksa tidak terlihat antusias dalam mempelajari ataupun mengenal calon yang tengah bersaing. Hal ini terlihat dari pandangan beliau berikut ini: “wah, udah gak ingat lagilah pak, taulah bapak, ibu-ibu ini bukan cuma itu aja yang mau dipikirin. Kalau bapak tanya waktu itu tahun 2015 masih ingat saya sekarang sudah 2018, gak ingat lagi saya”.

Dari penggalan wawancara di atas, Iksa memang mengungkapkan rentang waktu yang membuat beliau tidak mengingat siapa calon yang tengah bersaing kala itu. Pemilihan yang berlangsung pada tahun 2015, ditanya tahun 2018 merupakan waktu yang cukup lama sehingga kemungkinan lupa itu dapat terjadi. Namun secara implisit Iksa memperlihatkan bahwa ia tidak begitu memperdulikan kondisi kepemiluan yang tengah terjadi, hal ini terlihat dari ungkapan “taulah bapak, ibu-ibu ini bukan cuma itu aja yang mau dipikirin”. Ungkapan tersebut memperlihatkan sisi ketidakpedulian seseorang terhadap sesuatu dengan alasan banyak hal yang harus dipikirkan ataupun dikerjakan. Sisi tidak peduli seorang Iksa ini diperlihatkan ketika beliau juga berpandangan tidak ada perubahan yang dihasilkan dari berubah atau bergantinya seorang pemimpin.

Hal menarik dari seorang Iksa adalah keputusannya dalam memilih di hari H. menurut beliau keputusannya tidak hadir di hari H, bermula dari obrolan-obrolan dengan para tetangga. Lazimnya ibu-ibu yang sering berinteraksi erat (merumpi) tentang berbagai macam hal, terkadang obrolan itu juga mengupas masalah politik dan pilihan-pilihan. Dari obrolan tersebut seorang Iksa mendapatkan informasi tentang bagus tidaknya seorang calon ataupun bentuk-bentuk fasilitas yang diberikan. Menurut Iksa obrolan khas ibu-ibu itu mengerucut pada sisi lelahnya mereka melihat pemimpin, yang ketika dipilih tidak juga memberikan kontribusi. Bahasa para ibu-ibu itu berkisar tentang “milih gak milih ya gini-gini aja keadaan, golput aja sekalian gak datang ke tps.”

Pilihan untuk tidak memilih pada pemilihan walikota Medan tahun 2015, menurut Iksa tidak ia peroleh dari suaminya. Baginya pilihan seseorang itu adalah hak pribadinya dan ia tidak mempengaruhi jika suaminya ingin memilih kala itu, begitupun sebaliknya.

## Saiful

Saiful adalah warga yang tinggal di Sei Sikambing C Kecamatan Medan Helvetia. Sehari-hari Saiful bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah perusahaan. Pekerjaan sebagai petugas keamanan atau sekuriti membuat Saiful jarang bersosialisasi dengan tetangga. Hal ini terjadi ketika ia bertugas jadwal malam, sedangkan siangnya ia habiskan untuk beristirahat.

Terkait politik, Saiful juga tidak terlalu fanatik ataupun begitu mengambil pandangan terlalu dalam. Hal ini terlihat dari beberapa pendapat yang beliau utarakan tentang pengalaman maupun pandangannya terkait pemilihan umum Walikota Medan tahun 2015.

Pada pemilihan walikota Medan tahun 2015, Saiful termasuk warga yang tidak hadir ke TPS. Bagi beliau kala itu, tidak muncul niat di hati untuk memilih yang pada akhirnya muncul keinginan meskipun pada hari itu libur bekerja. Kondisi ini juga menular ke istri Saiful meskipun beliau tidak pernah melarang istrinya untuk menggunakan hak pilihnya.

Niat di hati yang tidak muncul juga didukung dari profil calon walikota yang tidak beliau kenal secara lengkap. Berikut penggalan wawancara dengan Saiful: “enggak juga, kalau sama Eldin ya tahu karena dia kan PLT waktu itu, tapi yang lain enggak.gak ingat pun siapa-siapa aja kemaren calonnya ... C6 dapat, anak pun dapat orang udah umur 29 tahun dia. Tapi karena saya gak datang orang inipun ikut-ikutan gak milih.”

Secara tidak langsung Saiful mengungkapkan kritiknya terhadap pasangan calon walikota yang tidak melakukan sosialisasi. Hal ini terlihat dari sosok yang tidak dikenal dan program yang tidak diketahui. Saiful juga mengeluhkan lambannya realisasi dari setiap keluhan warga. Hal ini semakin mempertajam bahwa walikota terpilih tidak menyentuh pada apa yang masyarakat Kota Medan butuhkan. Pada akhirnya pilihannya jatuh pada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Jatuhnya keputusan seorang Saiful dan keluarga untuk tidak memilih tidak berdasarkan agama ataupun suku dan ras. Bagi beliau satu suku pun dengannya jika rekam jejaknya nya kurang bagus juga tidak jadi alasan untuk tetap memilih.

Politik kepentingan menjadi dasar sikap tidak percaya Saiful kepada mereka yang duduk di jabatan strategis. Beliau hanya melihat hal ini berada pada titik kepentingan segelintir orang untuk mengkayakan dirinya, sementara janji ataupun pelayanan kepada masyarakat terlihat jauh dari harapan bahkan terkesan tidak berjalan.

Aspek budaya, sosial dan religi dalam bentuk kontestasi politik pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi jamak terjadi ketika dilihat dalam bingkai peristiwa politik yang mengedepankan dimensi mencari kekuasaan, secara sederhana hal ini juga dilihat sebagai bagian dari praktik politik yang bebas dengan memasukkan unsur-unsur kehidupan dalam ranah politik itu sendiri.

Kebudayaan, sosial dan religi adalah tiga konsep utama yang menjadi topik pembahasan secara berulang dalam praktik politik di Indonesia secara umum, untuk dapat menjelaskan relasi antara fenomena tiga konsep utama tersebut, kebudayaan lebih dipahami sebagai sesuatu yang memiliki sifat yang dinamis sehingga dalam prosesnya tidak steril dari perubahan yang berdampak pada modifikasi atau pembentukan kembali (*reshape*) kebudayaan sebuah masyarakat. Kebudayaan bahkan memiliki variasi sebagai hasil dari pengalaman dan interpretasi yang beragam manusia atau individu yang menjadi anggota masyarakat. Seperti pendapat yang dikatakan oleh Geertz (1973: 35) bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk memodifikasi perilakunya di tempat-tempat yang berbeda sehingga apa yang terlihat belum tentu merupakan dirinya yang sebenarnya. Kondisi ini yang memunculkan konsep-konsep apa itu natural, universal, dan konstant di dalam diri manusia.

Menurut Foucault (2000), kekuasaan mempunyai banyak bentuk dan penerapan dari bentuk-bentuk kekuasaan berbeda-beda berdasarkan setting masing-masing. Kekuasaan juga

terdapat pada sejumlah institusi, dan struktur kekuasaan tidak dapat diartikan sebagai struktur yang mantap. Ia justru akan selalu berubah sejalan dengan interaksi yang terjadi secara terus-menerus, berupa perjuangan, perebutan, maupun persaingan – serta berkembangnya cara berfikir dan perilaku para pelaku. Dengan demikian, kekuasaan pada dasarnya akan selalu dinamis dan menyebar tanpa bisa dilokalisir serta meresap dalam seluruh jalinan hubungan sosial.

Dalam melihat bentuk praktik kekuasaan-kekuasaan (powers) dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, dalam hal ini pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 adalah bentuk sebagaimana yang dikemukakan oleh Tania Li (2007:25-26) sebagai bentuk keberagaman kekuasaan, beragam cara praktik memposisikan orang, cara-cara yang beragam menghasilkan kesenjangan dan pertentangan-pertentangan dalam meraih kekuasaan secara politis.

Perspektif pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 juga menawarkan pandangan mengenai penggunaan isu religi sebagai muatan politis. Dalam hal ini Novianti (2013) memberikan pandangan mengenai penggunaan isu religi dalam lingkup politik kekuasaan pemilihan secara langsung sebagai kontestasi antara kelompok-kelompok dan memunculkan religi sebagai sebuah identitas. Aspek religi dimunculkan dalam bentuk simbol-simbol yang telah dikenal (*recognized*) sehingga wacana yang dibangun tentang politik dan kekuasaan. Mengacu dari Suhartono; Pelly; Azhari (2017:368) bahwa faktor etnik dan religi terbukti mempengaruhi keputusan pemilih dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2010. Namun, ketika masyarakat dihadapkan pada keputusan untuk memilih calon berdasarkan etnik atau agama, maka keputusan pemilih ternyata cenderung memilih berdasarkan agama.

Adapun isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 merupakan bagian dari friksi politik global sebagaimana juga dengan hasil penelitian dari *global commission on elections, democracy and security* yang diinisiasi oleh Yayasan Kofi Anan dan dirilis pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa ketika aspirasi demokrasi telah lama hilang, penduduk kini memiliki peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menyadari aspirasi-aspirasi tersebut, tetapi juga menghadapi perangkap berbahaya. Identifikasi isu dalam konteks ini meliputi tiga isu utama, yakni : kultural, sosial dan religi yang dibalut dalam bentuk aplikasi berupa politik identitas. Ketiga hal ini kemudian dilihat sebagai muara persoalan politik di Indonesia pada bentuk pemilihan kepala daerah secara langsung.

Realita penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam hal ini pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 membuka suatu wacana mengenai pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung pasca pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2014 yang menyisakan dampak sosial-kultural terhadap konstelasi perpolitikan di Indonesia secara umum dan tidak menutup mata terhadap ketidakberimbangan ekosistem politik; pemilih—calon—partai—institusi/lembaga penyelenggara—pemilu—hasil pemilu di luar sistematis penyelenggara pesta demokrasi secara langsung yang diadakan dalam kurun waktu lima tahun. Terlihat bahwa tiap dimensi yang berkorelasi terhadap kegiatan pemilihan secara langsung dengan mengambil contoh kecil pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 yang terlaksana dan berhasil memilih pasangan Walikota dan Wakil Walikota Medan dengan situasi dan kondisi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat yang dipengaruhi keberkaitan ekosistem politik, sosial, kultural, religi hingga pada dimensi usia pemilih, jenis kelamin, pekerjaan dan wilayah pemilihan.

Dalam penulisan ini, keseluruhan informan memiliki dinamika latar belakang; pekerjaan, religi, status sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan. Secara umum, proses pendidikan politik yang didapat oleh tiap-tiap informan merupakan pengetahuan yang terkait dengan keluarga dan memiliki hubungan dengan persepsi yang dibangun oleh informan. Persepsi muncul tatkala

latar belakang keluarga informan yang tidak bergabung dalam partai politik, satu perkumpulan marga (kultural), pandangan religi sehingga memunculkan kepercayaan atau *belief* yang kuat bahwa partisipasi dalam pemilu memilih atau tidak memilih sama saja karena tidak membawa pengaruh pada diri informan.

Pola afeksi yang tampak pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 menggambarkan mengenai tidak maksimalnya peran partai; mesin partai dalam mengolah wacana tentang calon yang diusung maupun wajah partai dalam konstalasi politik Indonesia secara umum, calon Walikota dan Wakil Walikota seakan melupakan masyarakat Kota Medan sebagai pemilih dan memberikan perhatian hanya kepada hal-hal yang bersifat seremonial serta kelompok masyarakat tertentu yang dikenal memiliki kedekatan secara terbatas untuk kepentingan politik semata.

Kedua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015; Dzulmi Eldin dan Akhyar Nasution serta Ramadhan Pohan dan Eddie Kusuma menjadi pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang mengikuti pemilihan kepala daerah dengan tingkat partisipasi rendah dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah secara langsung.

Kekurangan popularitas calon yang mempengaruhi tingkat elektabilitas tidak dilihat oleh partai pengusung sebagai faktor afeksi yang cukup signifikan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015, afeksi pemilih juga mendorong untuk menggali informasi mengenai kedua pasangan calon dan pada umumnya gagal mencari benang merah yang dapat menghubungkan kedua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 itu dengan kehidupan masyarakat Kota Medan secara luas, jikalau ada aspek yang menghubungkan antara calon dan masyarakat hanyalah kedekatan umum yang juga tidak dioptimalkan menjadi jalan meraup suara pemilih yang berbasis religi dan kultural.

Popularitas kedua calon yang rendah serta kurang maksimalnya partai dan calon mewacanakan aspek religi dan kultural untuk menghubungkan antara calon dan masyarakat menjadi celah politik bagi masyarakat Kota Medan untuk membentuk suatu resistensi politik terhadap calon Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 dan menjadi *gap* yang nyata diantaranya serta berimbas pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat yang hanya mencapai angka 25.38%.

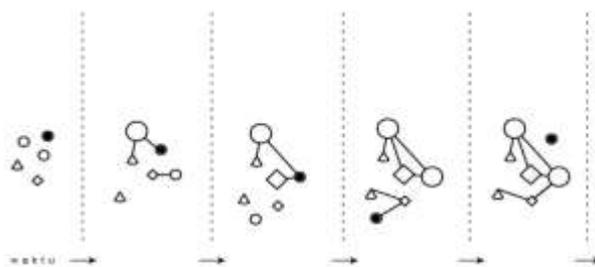
Aspek afeksi dan emosi pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 adalah media ekspresi atas sikap masyarakat pemilih terhadap kondisi politik lokal dan global serta sebagai strategi keterlibatan masyarakat dalam politik yang dilihat sebagai peran baru masyarakat dalam era keterbukaan informasi. Sisi afeksi dan emosi pemilih juga ditentukan oleh dua hal itu, yakni *mental rehearsal* adalah kondisi dimana masyarakat pemilih menerima opini baru tersebut, mengingatkannya, serta mempelajari opini tersebut kemudian membandingkannya dengan pemahaman terhadap opini tersebut sebelumnya. Proses mempelajari opini baru tersebut bergantung pada motivasi masyarakat pemilih apakah ia termotivasi untuk mempelajari opini tersebut atau langsung menolak. Kemudian kondisi kedua adalah *incentive for acceptance*, yaitu hal yang mendukung masyarakat pemilih untuk menerima opini tersebut. Pada dua hal inilah agaknya yang melatari keputusan warga masyarakat untuk memilih dan tidak memilih pada Pemilihan Walikota Medan tahun 2015 yang lalu. Kombinasi antara kognisi (pikiran) dengan afeksi (perasaan/emosi) pada akhirnya menjadi pendorong lahirnya sebuah keputusan atau tindakan memilih atau tidak memilih.

Proses rekonfigurasi politik pada pelaksanaan Pilwako Medan tahun 2015 diartikan sebagai proses perubahan bentuk pengetahuan pemilih dari politik konvensional menjadi bentuk pengetahuan politik secara modern dengan mengikutsertakan pemahaman pemilih terhadap tindakan memilih dan atau tidak memilih dengan dasar pemikiran terhadap pengetahuan politik secara personal yang melingkupi peristiwa politik Pilwako Kota Medan tahun 2015 yang lalu. Dengan kata lain, deskripsi pembahasan bab ini merupakan bentuk analisis terhadap keterkaitan

antara faktor sosial dan faktor budaya yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih pada proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan pada tahun 2015. Pilwakot Kota Medan tahun 2015 dalam penjelasan ini adalah suatu deskripsi mengenai proses pembentukan budaya yang menjadi wacana tanding (*counter disourse*) pada praktik politik,

Rekonfigurasi politik secara nasional yang terjadi sejalan dengan lintasan sejarah dapat dibagi pada beberapa fase, sebagaimana yang terpapar dalam ilustrasi rekonfigurasi, yakni: fase pasca kemerdekaan 1945, pada tahapan berikutnya rekonfigurasi politik terjadi pada praktik politik orde lama, fase orde baru, fase rekonfigurasi paska reformasi menimbulkan pemilahan kepentingan dengan menautkan secara langsung kepentingan politik dengan dimensi kultural, sosial, religi melalui kehadiran beragam partai dengan dasar (*platform*) dimensi kultural, sosial dan religi. Fase terkini dalam rekonfigurasi adalah masuknya celah pemilihan secara langsung pada proses pemilihan kepala daerah yang memunculkan wacana politik baru dengan menguatnya dimensi kultural, religi dan sosial diluar praktik politik pilkada, hal ini menimbulkan resistensi pada dimensi kultural (etnisitas dan identitas) dengan menanggalkan kepentingan politik praktis yang menyeret dimensi kultural pada pertarungan politik praktis pada satu sosok personal calon (legislatif, eksekutif) yang tidak berimbang pada proses pengembangan kebudayaan dalam lingkup kebudayaan tradisional dengan penghampiran kebudayaan *hybrid* yang seimbang.

Perhatian pada praktik politik telah meminggirkan konsepsi kebudayaan sebagai suatu bagian strategi dan adaptasi dalam kehidupan dan luput dari perhatian politik secara holistik, dan menjadi celah perhatian bagi antropologi untuk melihat fenomena politik sebagai bagian proses fenomena kultural yang dinamis.



Gbr. 1. Ilustrasi Rekonfigurasi Politik

Dalam dimensi ruang dan waktu perjalanan politik Indonesia setelah runtuhnya orde baru telah terjadi perubahan yang mendasar dalam proses pemilihan umum yaitu melalui penerapan sistem pemilihan presiden, legislatif dan kepala daerah secara langsung. Hal yang cukup menarik berkaitan dengan perubahan mendasar pada sistem pemilihan umum ini adalah dinamika yang terjadi pada perilaku pemilih. Maraknya pemilu, baik itu menyangkut pemilihan Presiden, pemilihan Kepala Daerah, pemilihan anggota legislatif baik itu DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan, membuat dinamika perilaku pemilih sangat menarik untuk diamati, karena dengan terjadinya perubahan pada sistem pemilu, telah menjadikan suara pemilih menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan siapa yang akan terpilih pada berbagai proses kontestasi pemilu tersebut. Dimana pada pemilu-pemilu sebelumnya pemilih hanya menjadi salah satu indikator dari sistem demokrasi prosedural.

Mengutip Surbakti (dalam Efriza 2012:480) dalam narasi pemilih terhadap pemilihan umum mengatakan bahwa memilih diartikan sebagai bentuk aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak

memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilu maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu. Walau dalam beberapa bentuk penerapan proses memilih dalam politik pilkada di Indonesia, tidak memilih adalah suatu bentuk pilihan yang tidak diserap dalam bentuk peraturan dan menjadikan tindakan tidak memilih sebagai suatu keputusan dilihat sebagai bagian rekonfigurasi tindakan memilih oleh pemilih dengan beragam cara dan penerapan yang berbeda serta tidak menyalahi aturan pemilihan yang berlaku.

Rekonfigurasi politik pada tahun 2015 atau pada masa pasca era reformasi menawarkan beragam bentuk konfigurasi politik yang beragam dengan mengedepankan prinsip keterbukaan secara demokrasi yang diejawantahkan dalam bentuk perilaku politik memilih. Faktor sosial dan faktor budaya sebagai dua sisi yang berdampingan, memiliki dampak terhadap rendahnya tingkat partisipasi pemilih terhadap proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan pada tahun 2015, hal ini tampak dari rendahnya partisipasi pemilih sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem politik berupa pemilu yang tidak kunjung memberikan kontribusi perubahan terhadap masyarakat luas.

Rekonfigurasi politik yang dilakukan oleh pemilih membentuk suatu perilaku yang normal secara politis, usaha perlawanan dan pola resistensi ditunjukkan sebagai bagian strategi menghadapi kewajiban politik berupa memberikan suara aspirasi kepada calon pemimpin daerah. Usaha perlawanan dan pola resistensi ini tidak berdiri sendiri melainkan juga turut serta membawa faktor sosial dan budaya sebagai faktor penguat strategi rekonfigurasi politik yang dilakukan, hal ini dilakukan baik secara disadari maupun tidak disadari atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa strategi rekonfigurasi politik pemilih dengan usaha resisten itu berjalan dalam tataran kognisi yang dipengaruhi campur baur faktor sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari.

### III. KESIMPULAN

Hasil penelitian lapangan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebaran tingkat partisipasi pemilih dalam Pilwako Medan tahun 2015 berdasarkan deskripsi atas wilayah tidak memiliki korelasi dengan keberadaan etnis secara mayoritas dengan tingkat partisipasi pemilih. Hal ini sebagaimana terlihat dari ekspos trend partisipasi atau tingkat kehadiran pemilih ke TPS pada Pilwako tahun 2015. Selain itu, kelompok etnis Cina merupakan kelompok etnik yang menunjukkan tingkat partisipasi rendah, menyusul etnis Melayu, Jawa, Mandailing dan Karo. Dengan demikian, semakin jelas bahwa sebaran tingkat partisipasi pemilih secara geografis tidak ada hubungannya dengan lokasi tempat tinggal kelompok etnis. Rendahnya tingkat partisipasi etnis Cina yang ada di Kecamatan Sunggal terlihat dari penjelasan informan pada saat diwawancarai. Di daerah ia tinggal mayoritas warganya adalah etnis Cina, namun berdasarkan penuturannya tidak banyak etnis Cina yang memberikan hak pilihnya.

Penyaluran aspirasi politik dalam bentuk kultural seperti identitas etnik bukan merupakan isu signifikan pada praktik politik pemilihan langsung di Indonesia secara umum, dan di Kota Medan khususnya proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 yang lalu. Dimensi politik dan kultural adalah dua sisi dari sekeping koin praktik kehidupan, yang terpisah disebabkan kepentingan dan narasi historis yang berbeda; politik sebagai alat kekuasaan sedangkan kultural merupakan perangkat kehidupan, Kegagalan menjadikan aspek kultural (*cultural mainstream*) pada praktik politik pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan kegagalan sistem politik mengelola potensi kebudayaan sebagai modal kontestasi. Praktik politik demokrasi membutuhkan calon pemimpin yang dipilih secara langsung dan memiliki konektivitas erat dengan kebudayaan bukan pelekatan kebudayaan sesaat.

Keputusan memilih dan tidak memilih merupakan sebuah proses budaya (Svitaylo, 2012) dimana kombinasi orientasi kognitif (*reason*) dengan orientasi afektif (*emotion*) pada akhirnya

melahirkan sebuah evaluasi terhadap kedua orientasi yakni kognisi dan afeksi. Hasil evaluasi inilah yang pada gilirannya melahirkan sebuah tindakan memilih atau tidak memilih.

Konsepsi kebudayaan dalam dimensi politik Pilwakot Kota Medan tahun 2015 dipergunakan untuk melihat realitas fenomena politik yang menarik aspek kultural sebagai bagian dari kontestasi politik pilkada yang selama ini dipraktikkan pada ranah kultural dengan aturan dan tata-cara tradisionil. Pada proses perkembangannya, politik pilkada secara eksplisit mempertemukan arus tradisionil dan modern pada suatu realita hybrid.

Aronoff dan Kubik (2013:200) melihat bahwa praktik kultural pada politik merupakan bagian kultural yang menitikberatkan pada persoalan masyarakat sipil (*civil society*) yang berkembang dan beradaptasi melalui kanal kultural terhadap aspek politik, dalam prosesnya kultural menjadi dimensi yang beradaptasi melalui proses pembentukan awal (*organize*), pengelolaan (*maintain*), mediasi dan membangun keseimbangan.

Sebaran tingkat partisipasi yang berbeda diberbagai wilayah Kecamatan yang ada tidak berkorelasi dengan komposisi etnik yang ada. Hal ini mengingat tidak semua wilayah Kecamatan maupun Kelurahan memiliki data etnik yang lengkap. Untuk itu penting bagi KPU memasukkan elemen data etnik di dalam proses pendataan sehingga dapat diperoleh gambaran tentang realitas etnik yang ada di masing masing wilayah secara akurat. Selain itu, kegiatan sosialisasi perlu dilakukan tidak hanya oleh penyelenggara KPU, tapi juga oleh semua pihak terutama pasangan calon yang akan berkontestasi. Ini penting mengingat banyak pemilih yang belum atau tidak mengenal secara baik calon atau partai pendukung pasangan calon.

Rendahnya tingkat partisipasi pada beberapa kelompok etnik seperti kelompok etnis Cina, Melayu, Jawa, Batak Mandailing, dan Karo menunjukkan perlu adanya pendekatan secara kultural baik oleh penyelenggara maupun kalangan partai politik terhadap pemilih dengan latar belakang etnik yang beragam.

Terkait faktor sosial budaya yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi karena kurangnya sosialisasi oleh calon serta kedekatan hubungan baik secara social, emosional dan kultural yang tidak dipergunakan secara maksimal oleh para calon, sehingga pemilih cenderung bersifat rasional. Sebagai saran maka perlu diperkuat insitutsi maupun pranata sosial yang ada di masyarakat sehingga mampu menjadi modal sosial sekaligus modal politik bagi para pihak utamanya para calon dan partai politik yang akan bertarung dalam sebuah proses kontestasi politik.

## Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel A. and Sidney Verba. 1965. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations: An Analytic Study*. Boston, Toronto: Little, Brown, cop.
- Aronof, Myron J & Jan Kubik. 2013. *Anthropology and Political Science*, Berghalm Books, New York, USA.
- Ambardi, K. Munaji dan Liddle, R.W. 2012. *Kuasa Rakyat: Analisis Perilaku Memilih Indonesia Pasca Orde Baru (Peopel Power: An Analysis of Post Ner Order Indonesian Voting Behaviour)*. Bandung: Mizan.
- Bruner, Edward. 1987. "Kerabat dan Bukan Kerabat" dalam *Pokok-Pokok Antropologi Budaya. TO Ihromi (ed)*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Boggs, James P., 2004, *The Culture Concept as Theory, in Context*. Current Anthropology 45(2): 187-209.
- Dieter Evers, Hans. 1990. *Kelompok Kelompok Strategis*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Efriza. 2012. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Alfabeta, Bandung
- Foucault, Michel. 2000. *Power*, Penguin Book Ltd, London
- Firdausi, Fadrik Aziz, 2017. *Njoto; Biografi Pemikiran 1951-1965*. Marjin Kiri. Tangerang Selatan.

- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.
- Geertz, Clifford. 1992, *Politik Kebudayaan*, Kanisius, Jakarta
- Harahap, Akhir Matua. *Data Etnik di Sumatra Utara dan Kota Medan*  
<http://akhirmh.blogspot.co.id/search/label/Sejarah%20Kota%20M>, Diakses 06.30 WIB. 5 Desember 2017
- Pelly, Usman. 1994, *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*, Jakarta, LP3ES
- Pelly, Usman. 2016, *Etnisitas dalam Politik Multikultural Buku III*, Medan, Casa Mesra Publisher,
- Stanič, Janez in Dušan Macura (1992): Uvod. In Janez Stanič in Dušan Macura (eds.), *Demokracija in politična kultura: 7–8*. Ljubljana: Enajsta univerza.
- Svitaylo, Nina and Andriana Kostenko, Ana Podgornik. 2014. *Electoral Political Culture in Ukraine; A Case Study of Ukrainian Parliamentary Elections of 2012*. *Teorija in Praksa* Let 51, 5/2014. (p.928-943)
- Surbakti, Ramlan. 2010, *Memahami Ilmu Politik*. PT. Grasindo, Jakarta
- Suhartono, Edy. Usman Pelly, Ichwan Azhari, 2017. *Ethnic relations in Contestation of Regional Head Election Year 2010 in Medan City*, Paper Conference, ICOSOP 2017, 2nd International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 2017), Medan, North Sumatra, Published by Atlantis Press, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 136,
- Weeks, Jeffrey. 1990. *The Value of Difference*. Dalam Jonathan Rutherford (ed). *Identity, Community, Culture, Difference*. London: Lawrence & Wishart.
- Wahyuningsih, Titik Prihati, dkk (Ed). 2015. *Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2015*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta
- KPU Kota Medan. 2016. *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015*, KPU Kota Medan
- Badan Pusat Statistik 2017, *Kota Medan dalam Angka*, CV. Rilis Grafika, 2017
- Badan Pusat Statistik, 2010. *Global Commission on Elections, Democracy and Security. Pendalaman Demokrasi: Strategi untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia*. Laporan dari Komisi Global Untuk Pemilihan Umum, Demokrasi dan Keamanan, September 2012. Yayasan Kofi Annan.